

Abstrak

Bendahara pemerintah selaku pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berperan penting dalam mengumpulkan pajak. Kinerja bendahara pemerintah menjadi sorotan utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah disebut *withholding system*, yaitu bertindak sebagai pemotong dan/atau pemungut. Sehubungan dengan APBN dan APBD, salah satu pajak yang dikumpulkan dari dana tersebut ialah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kewajiban bendahara pemerintah Kabupaten Toba dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 serta faktor-faktor terkait yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara untuk mendukung validitas data yang akan diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Wawancara dilakukan kepada *Account Representative* KPP Pratama Balige, bendahara pemerintah, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemotongan dan penyetoran oleh bendahara pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, kewajiban pelaporan masih menjadi kendala. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bendahara pemerintah dapat memberikan upaya dalam peningkatan kinerja pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Bendahara Pemerintah, Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract

The government treasurer as the party appointed by the government plays an important role in collecting taxes. The performance of the government treasurer is the main highlight in increasing tax revenue. The tax collection system carried out by the government treasurer is called the withholding system, which is to act as a cutter and/or collector. In relation to the state budget and the regional budget, one of the taxes collected from these funds is Income Tax Article 21. This study aims to evaluate how the implementation of the obligations of the treasurer of the Toba Regency government in making withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 21 as well as related factors that affect it. The method used is literature research and field research with interviews to support the validity of the data to be obtained in the form of primary data and secondary data. Interviews were conducted to Account representatives of KPP Pratama Balige, government treasurer, and academics. The results showed that the obligation of withholding and depositing by the government treasurer has been implemented properly. However, the reporting obligation is still an obstacle. Identifying the factors that affect the performance of the government treasurer can provide efforts to improve the performance of the implementation of tax obligations of the government treasurer.

Keywords: Performance Evaluation, Government Treasurer, Income Tax Article 21